

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era milenial ini ada pergeseran dari arus globalisasi, yaitu maraknya penggunaan media sosial. Yang mana media sosial bukan lagi hanya menjadi hiburan semata, namun sudah bisa menjadi ajang mencari upah atau penghasilan. Sehingga sudah banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi pekerja lepas atau wirausahawan yang berlatar belakang media sosial. Dengan adanya pergeseran dari arus globalisasi tersebut sehingga menambah jenis profesi baru dikalangan masyarakat yang menjadi lebih beragam. Pengertian Pajak Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Sedangkan Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publik uitvagen*).² Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat guna

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

²Rochmat Soemitro. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994* . Jakarta .Penerbit PT Eresco. hal.22

kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat umum. dapat disimpulkan bahwa pajak adalah dari rakyat dan untuk rakyat karena adanya pemungutan pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila tidak ada pemungutan pajak, negara akan kesusahan dalam melakukan infrastruktur pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan utama dari suatu negara.³

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Huruf (a) menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu negara mengatur perihal perpajakan tersebut didalam undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan pajak penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.⁴

Peran penting dari pajak dalam keuangan negara tidaklah terlepas dari Fungsi-fungsi dalam pajak tersebut. Fungsi tersebut yaitu Fungsi *Budgetair* yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, contohnya : dimasukkannya pajak kedalam ABPN sebagai kas negara dan Fungsi *Regulerend* yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya pajak yang tinggi untuk minuman keras sehingga dapat mengurangi

³Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Pajak*. Jakarta .Penerbit Sinar Grafika. hal.1

⁴Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daya beli dari minuman keras itu sendiri atau pajak tinggi bagi barang mewah sehingga mengurangi sifat konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat.⁵

Pajak di Indonesia dibagi menjadi berbagai macam jenis yaitu, Menurut golongannya ada pajak langsung dan tidak langsung, Menurut sifatnya ada pajak subjektif dan objektif, Menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal pajak dan Bea Cukai, Pajak daerah yang dipungut oleh daerahnya baik daerah propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota Madya.⁶ Semua warga negara indonesia baik yang berdomisili di indonesia maupun di luar Indonesia serta badan hukum Indonesia atau asing yang berdomisili di Indonesia merupakan subjek pajak dan memiliki kewajiban pajak atau biasa disebut wajib pajak. Sedangkan Warga Negara Asing (WNA) baru bisa dikatakan subjek pajak apabila mempunyai hubungan ekonomis (mendapatkan penghasilan) dengan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) para subyek pajak diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan mereka dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan guna mengetahui apakah para subjek pajak ini dapat dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang terkait.⁷

Pajak penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

⁵Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hal. 1

⁶Sunarto. 2003. *Perpajakan 1*. Yogyakarta. Penerbit Amus Yogyakarta. hal. 10-13

⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.⁸Subjek pajak di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Subjek pajak dalam negeri

Orang pribadi mulai dilahirkan di wilayah Indonesia atau pada waktu seseorang menetap di Indonesia dan berakhir pada waktu seseorang meninggal dunia atau pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. sedangkan badan hukum mulai Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.⁹

b. Subjek pajak luar negeri

Non Bentuk Usaha Tetap (BUT) mulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia. Sedangkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Mulai saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.¹⁰

c. Warisan belum terbagi

Warisan belum terbagi mulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan .

⁸Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Pajak*. Jakarta .Penerbit Sinar Grafika. hal.51

⁹Sunarto. 2003. *Perpajakan 1*. Yogyakarta. Penerbit Amus Yogyakarta. hal. 89

¹⁰Ibid.

Tidak semua subjek pajak merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak, karena ada ketentuan di dalam Undang-Undang mengenai hal tersebut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Setelah menentukan wajib pajak, selanjutnya wajib mendaftarkan Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus diberikan NPWPnya tersebut. apabila wajib pajak tidak mendaftarkan NPWP tersebut maka akan dikenakan sanksi perpajakan.¹¹ Penghasilan yang dapat dikenakan pajak atau yang biasa disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan jumlah penghasilan subjek pajak yang dikenai pajak. besaran penghasilan kena pajak merupakan dasar penerapan tarif pajak penghasilan kena pajak diperoleh dengan mengurangi penghasilan netto (penghasilan netto sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan netto lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) dengan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun pajak yang bersangkutan.¹²

Youtuber merupakan istilah yang digunakan bagi seseorang yang memiliki konten youtube. sedangkan Youtube sendiri yang dikenal dengan slogan “*Broadcast Yourself*”, adalah situs video *sharing* yang menyediakan berbagai

¹¹Sunarto, 2003 *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit : Air Printing

¹²Dirjen Pajak, *Penghasilan Kena Pajak* , <http://www.pajak.go.id>Di akses Pada tanggal 20 November 2017

informasi berupa audio-visual.¹³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *youtuber* adalah seseorang yang memiliki konten youtube sebagai media berbagi informasi bagi para *viewer* atau penonton video mereka. *Youtuber* merupakan salah satu dari subjek pajak karena *youtuber* sudah memenuhi unsur-unsurnya untuk menjadi subjek pajak. Konten adalah berasal dari bahasa inggris yaitu content adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media. Sehingga pengertian dari konten youtube adalah media untuk menyalurkan informasi dengan menggunakan video sebagai penyalur informasi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pajak yang sudah berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dapat dikatakan sebagai wajib pajak dan berhak mendapat NPWP serta berkewajiban untuk membayar pajak.¹⁴

Di Indonesia atau tepatnya di Kota Malang banyak sekali para *youtuber-youtuber* yang sudah terkenal di seantero Indonesia. Seperti Bayu Eko Moektito atau Bayu Skak yang terkenal berkat video lucunya yang berbahasa jawa, Lalu

¹³Abraham, A. 2011. *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*. Surabaya. Penerbit : PT. Java Pustaka Group.

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Harfrida Vindy yang terkenal karena kepintarannya memoles wajahnya, Lalu Indra Widjaya yang terkenal berkat kepintarannya dalam hal bermusik, Lalu Arya Dega yang terkenal sebagai, dan masih banyak lagi yang lainnya . Dengan menjamurnya para *youtuber* ini menimbulkan pertanyaan apakah menjadi seorang *youtuber* merupakan sebuah kesenangan dalam mengisi waktu luang saja, atau menjadi seorang *youtuber* dapat menambahkan penghasilan bagi para *youtuber* tersebut. dan apabila menjadi seorang *youtuber* menambah penghasilan dari para *youtuber* tersebut dan Penghasilan tersebut kena pajak apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara indonesia yang baik dengan membayar pajak, selain itu pajak dari *youtuber* yang notabene adalah orang pribadi menjadi lemah daya tariknya dibandingkan dengan pajak dari perusahaan-perusahaan besar. Padahal persoalan pajak di Indonesia bukan hanya persoalan berapa banyak pajak yang dihasilkan tetapi bagaimana cara para pihak yang bersangkutan yang dalam permasalahan ini adalah petugas pajak menerapkan peraturan didalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap para *youtuber*.

Berdasarkan Masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah diatas untuk menjadi sebuah Karya Ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB YOUTUBER SEBAGAI PELAKU USAHA DI MEDIA ONLINE TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN”** (*Studi Lapangan Di Kota Malang*)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban oleh *youtuber* dalam pembayaran pajak penghasilan?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak penghasilan oleh *youtuber* di Kota Malang ?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam mengupayakan pembayaran pajak penghasilan bagi *youtuber*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban oleh *youtuber* dalam pembayaran pajak penghasilan di Kota Malang
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak penghasilan oleh *youtuber* di Kota Malang
3. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam mengupayakan pembayaran pajak penghasilan oleh *youtuber*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan keilmuan hukum Perpajakan
- b. Untuk menambahkan kajian ilmiah dalam metode pembelajaran

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian
- b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam memperdalam teori dan praktek hukum perpajakan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Pajak, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pajak penghasilan yang di keluarkan oleh para pelaku usaha di bidang media online khususnya *Youtuber*
- b. Bagi *Youtuber*, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai kewajiban-kewajiban dalam perpajakan bagi Warga Negara Indonesia
- c. Bagi Penulis , seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang

Kegunaan Akademis

- a. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah:

- a. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
- b. Penelitian deskriptif yaitu dimana peneliti berusaha memberikan gambaran tentang tanggung jawab pelaku usaha di media online youtube dalam pembayaran pajak

2. Sumber Data

a. Data primer ini data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya yang tujuannya untuk penulisan laporan penelitian. Data ini bentuknya berupa :

1) Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Pajak Kota Malang dan *Youtuber* Kota Malang

2) Dokumen Yang di Peroleh

b. Data sekunder ini data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini bentuknya berupa :

1) Buku

2) Jurnal Ilmiah

3) Situs Web Resmi

4) Penelitian Terdahulu

5) Dll.

c. Data Tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedia , Kamus, Glossary, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

1) Secara Langsung

Wawancara atau interview ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan antara penulis dengan para narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Narasumber tersebut yaitu :

(1) Bapak Kukuh Hanna Prapanca sebagai *account representative* di seksi pengawasan dan konsultasi 3 pada KPP Madya Kota Malang

(2) Bapak Ida Bagus Gede Bramasta sebagai *account representative* pada KPP Pratama Malang Utara

(3) *Youtuber* Arya Dega

2) Secara Tidak Langsung

Wawancara ini dilakukan secara tidak langsung melalui Surat Elektronik yang dijawab langsung oleh narasumber yang bersangkutan. Narasumber tersebut yaitu:

(1) *Youtuber* Indra Widjaya

(2) *Youtuber* Syaif Rousyan Fikri

(3) *Youtuber* Abdul Aziz

(4) *Youtuber* Ndara Yanza Julyamantika

b. Analisa Data

Analisa ini berbentuk penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang dapat disimpulkan analisa data merupakan hasil dari penelitian yang

dilakukan oleh penulis guna menemukan suatu pemahaman terhadap hal-hal yang diteliti.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya tulis ini peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan penelitian mengenai pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan perpajakan, pelaku usaha serta media sosial youtube serta beberapa bahan penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti berusaha menganalisa tentang Penerapan peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan bagi para pelaku usaha media sosial khususnya youtube.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam melakukan penelitian tersebut dan saran sebagai masukan bagi perkembangan serta kemajuan sistem perpajakan di Indonesia.

¹⁵Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka.2002. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta. YKPN.